

DAFTAR PUSTAKA

- Afita Lianawati. 2015. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang*. <http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Edaj>. Diakses pada 4 Mei 2016
- Badan Pusat Statistik. *Pariaman Dalam Angka 2015*. Kota Pariaman.
- Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan penuntun Praktis*, Yogyakarta : CV ANDI OFFESET.
- Erly Suandi. 2008. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fauzan, Muhammad dan Moh. Didik Ardiyanto . 2012 *Analisis dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang Tahun 2008-2011* <http://ejournal-S1.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/285/288>. Diakses pada 20 Januari 2016.
- Fernantos, Jefri. 2015. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Setelah dan Sebelum Menjadi Pajak Daerah Tahun (2009-2013)*. Padang. Universitas Andalas.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrik Richart Pangemanan, Inggriani Elim, Stanley Kho Walandouw (2012). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta : Andi.
- Nurhayati Radjak, Rio Monoarfa, Hartati Tuli (2014). *Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak Daerah Kota Gorontalo*.
- Ratih Harinsari, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid. *Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, nomor 1, hal 265-270.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Ridwan (2014). *Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Banguna Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sekaran, Umma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

<http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-otonomi-daerah-dasar-hukum-prinsip-asas-dan-tujuan-otonomi-daerah.html>

